

DAFTAR PUSTAKA :

- Asshiddiqie Jimly, 2007 *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta
- Asshiddiqie Jimly, 1994, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta
- Attamimi Hamid S, 1991 , *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara,*” Disertasi Fakultas Pascasarjana UI, Jakarta
- C.F. Strong, 2004 , *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern* , Nusamedia, Jakarta
- Dunn, William N., 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Dwiyanto, Agus, dkk, 2006, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Cetakan Kedua, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- _____, 2008, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Cetakan Ketiga, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Islamy, Irfan, 2000. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Kusumanegara, Solahudin, 2010. *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*, Gava Media, Yogyakarta.
- Lawrence M. Friedman, 1984, *American Law*,: W.W. Norton and Company, New York,
- Makalah *Revitalisasi SDM Dalam Menghadapi Perubahan Pada Pasca Krisis* oleh Djamaluddin Ancok
- Moleong, Lexy J., 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muchamad Iksan, *Dasar-Dasar Kebijakan Hukum Pidana: Berperspektif Pancasila*, artikel dimuat dalam <http://hukum.ums.ac.id/?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=45>
- Muladi & Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung

Nyoman Sarikat P.J, 2005, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Undip, Semarang

Parsons, Wayne, 2005. *Public Policy : Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*, Prenada Media, Jakarta.

Pramusinto, Agus, dkk, 2009, *Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan dan Pelayanan Publik*, Gava Media, Yogyakarta

Prodjodikoro Wirjono, 1970, *Azas-azas Hukum Tata Negara di Indonesia* , Dian Rakyat, Jakarta

Purnama Eddy, 2007, *Negara Kedaulatan Rakyat: Analisis Terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara-Negara Lain*, Nusamedia, Jakarta

Rasjidi, Lili, dkk, 2012, *hukum Sebagai Sebuah Sistem*, PT. fikahati Aneska, Bandung

Ratminto dan Winarsih, 2005, *Manajemen Pelayanan Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen's Charter dan Standar Pelayanan Minimal*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Saptomo Ade, *Bahan Ajar Teori Hukum II*, Jakarta

Siagian, Sondang P, 2000, *Administrasi Pembangunan*, Bumi Aksara, Jakarta

Singarimbun, dan Effendi, S, 1989, *Metode Penelitian Survei*, PT. Pustaka LP3ES, Jakarta

Subarsono, AG., 2006. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori, dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Sugiono, 2009, *Metode Penelitian Administrasi*, Alvabeta, Bandung

Tjokrowinoto, Muljarto, 1996, *Pembangunan, Dilema dan Tantangan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Wahab, Abdul, Solichin, 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, UMMS Press, Malang

Winarno, Budi, 2008. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses Edisi Revisi*, Media Pressindo, Yogyakarta

Peraturan Perundangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Instruksi Bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor : INS/03/M/X/1999, Nomor : 29 Tahun 1999, Nomor : 6/IMK.014/1999, tentang pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCK), Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), Tanda Coba Kendaraan Bermotor (TCKB) dan Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ)